

DISTORSI KOMUNIKASI RUANG PUBLIK DALAM NOVEL *BUNGKAM SUARA*: KAJIAN DEMOKRASI DELIBERATIF JÜRGEN HABERMAS

Moch. Nur Riza Pratama Nugroho

Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya
mochnur.23128@mhs.unesa.ac.id

Putri Retnosari

Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya
putriretnosari@unesa.ac.id

Abstrak

Praktik pembatasan hak bicara dan manipulasi wacana oleh otoritas kekuasaan, berpotensi merusak tatanan demokrasi serta mendistorsi ruang publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap distorsi komunikasi dalam novel *Bungkam Suara* Karya J.S. Khairen sebagai refleksi realitas sosial yang memotret kekacauan ruang publik akibat propaganda dari penguasa. Metode kualitatif deskriptif dalam penelitian ini berfokus pada narasi, deskripsi, dan interpretasi seluruh tindakan komunikatif para tokoh berdasarkan kajian demokrasi deliberatif Jürgen Habermas. Teknik simak dan catat dalam penelitian ini digunakan untuk pengumpulan data dalam bentuk kata, frasa, maupun kalimat yang diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu fakta pembatasan hak bicara, bentuk distorsi komunikasi, dan pelanggaran klaim validitas Habermas (kebenaran, ketepatan, dan kejujuran). Data yang telah diklasifikasikan kemudian dianalisis dengan cara menginterpretasi data, membenturkan fakta, dan mengungkap dampak dari penyimpangan komunikasi tokoh. Kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada integrasi teori Demokrasi Deliberatif Habermas ke dalam kajian sastra kontemporer yang membongkar patologi komunikasi digital. Hasil penelitian ini, yaitu (1) pembatasan hak bicara warga dilakukan melalui pengawasan digital dengan ketat, bukan kekerasan fisik, (2) distorsi komunikasi dijalankan secara masif dengan operasi propaganda digital untuk menumpulkan kritis warga, dan (3) manipulasi tersebut berujung pada pelanggaran tiga klaim validitas Habermas secara mutlak yang merefleksikan matinya demokrasi deliberatif.

Kata kunci: demokrasi deliberatif, distorsi komunikasi, Jürgen Habermas, klaim validitas.

Abstract

The practice of restricting freedom of speech and manipulating discourse by those in power has the potential to undermine democratic order and distort the public sphere. This study aims to uncover communication distortions in the novel Bungkam Suara by J.S. Khairen as a reflection of social reality, depicting the chaos in the public sphere caused by propaganda from those in power. The descriptive qualitative method employed in this study focuses on the narrative, description, and interpretation of all communicative actions of the characters based on Jürgen Habermas's theory of deliberative democracy. The listen and note technique was employed in this study for data collection, capturing words, phrases, and sentences classified into three categories: instances of speech restrictions, forms of communication distortion, and violations of Habermas's validity claims (truth, accuracy, and honesty). The classified data was then analyzed by interpreting the data, comparing facts, and revealing the impact of the characters' communicative deviations. The novelty of this study lies in the integration of Habermas's theory of deliberative democracy into a study of contemporary literature that uncovers the pathologies of digital communication. The results of this study are: (1) restrictions on citizens' freedom of speech are enforced

through strict digital surveillance, not physical violence, (2) communication is massively distorted through digital propaganda campaigns designed to dull citizens' critical thinking, and (3) such manipulation results in a complete violation of Habermas three validity claims, reflecting the demise of deliberative democracy.

Keywords: *claims of validity, communication distortion, deliberative democracy, Jürgen Habermas.*

PENDAHULUAN

Komunikasi merupakan praktik fundamental yang membentuk kesepahaman antarindividu dalam ruang lingkup sosial. Menurut Habermas (1984, hal. 286), kesepahaman tersebut idealnya tidak didorong oleh kepentingan pribadi, melainkan untuk mencapai kesepakatan kolektif melalui diskursus rasional. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa legitimasi sosial seharusnya terbentuk melalui komunikasi terbuka dengan seluruh pihak. Habermas (1996, hal. 107) juga menegaskan, bahwa norma yang dianggap sah harus disepakati oleh seluruh pihak dalam diskursus.

Meskipun demikian, realitanya komunikasi selalu dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan. Castells (2009, hal. 10) mengungkapkan bahwa kekuasaan tidak hanya diraih melalui kekerasan, tetapi bisa melalui konstruksi makna dari penguasa. Hal ini digunakan untuk mengontrol persepsi publik agar selaras dengan agenda mereka. Pernyataan tersebut relevan pada era kontemporer ini karena informasi bisa diakses oleh khalayak luas. Castells (2009, hal. 12) juga menambahkan, bahwa sebagian besar legitimasi kekuasaan bergantung pada kesepahaman makna yang beredar. Dengan begitu, propaganda menjadi strategi terkuat penguasa dalam mempengaruhi warga negara untuk legitimasi kekuasaannya.

Dinamika tersebut terjadi dalam sejumlah fenomena faktual di Indonesia, seperti gerakan 'Peringatan Darurat' (Marsh & Singgih, 2024) yang *trending* di media sosial hingga menarik atensi media internasional. Selain itu, terdapat juga fenomena kontroversial mengenai undangan pemerintah kepada para *influencer* ke Ibu Kota Nusantara (IKN) (Muhid et al., 2024). Kedua fenomena tersebut didasari oleh dominasi otoritas secara mutlak tanpa melibatkan diskursus publik. Narasi yang beredar di media sosial memiliki dua agenda yang bertolak belakang. Pertama, sebagai ungkapan ketidakadilan pemerintah dalam perubahan undang-undang, tanpa melibatkan

masyarakat. Kedua, sebagai upaya pencitraan terhadap pembangunan ibu kota baru dengan dalih untuk menarik minat investor. Melalui kedua fenomena tersebut, terlihat jelas bahwa fungsi komunikasi yang idealnya membangun kesepahaman secara rasional, justru terdistorsi. Dalam situasi tersebut, mereka hanya berpura-pura melakukan tindakan komunikatif (*pseudocommunicative*) dengan tujuan tersembunyi (*concealed strategic action*) untuk melindungi kepentingan dirinya sendiri (Habermas, 1984, hal. 332).

Fenomena distorsi komunikasi dan manipulasi kekuasaan tidak terbatas pada realitas sosial saja, melainkan juga direpresentasikan dalam karya sastra. Wellek & Warren (1949, hal. 94) menyatakan, bahwa sastra merupakan institusi sosial yang menggunakan bahasa sebagai medium utamanya. Hal ini memungkinkan pengarang untuk memahami praktik manipulasi bahasa di dunia nyata dan mereproduksi ke dalam teks sebagai bentuk perlawanan simbolik. Damono (1978, hal. 1–2) mengungkapkan, bahwa karya sastra berkaitan dengan kondisi masyarakat di sekitarnya. Namun, tidak semua karya sastra dapat merefleksikan realitas sosial secara kompleks. Menurut Eagleton (dalam Faruk, 2017, hal. 44), novel merupakan salah satu *genre* yang mampu meleburkan fenomena faktual dan fiktional dalam satu narasi utuh. Hal ini memudahkan pembaca dalam mengenali pola-pola dinamika sosial secara emosional dibandingkan hanya membaca berita formal. Goldmann (dalam Faruk, 2017, hal. 93) juga menambahkan, bahwa struktur novel tidak terlepas dari kondisi sosial pengarangnya. Keselarasan latar sosial antara dunia pengarang dengan realitas pembaca inilah yang menciptakan perasaan relevan dalam sebuah konflik sosial.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memilih novel *Bungkam Suara* karya J.S. Khairen sebagai objek kajian, yang secara kompleks relevan dengan dinamika sosial sekarang. Novel ini menceritakan suatu negara

NKAL (Negara Kesatuan Adat Lemunesia) yang sangat tertutup dengan dunia luar. Meski begitu, teknologi yang dimilikinya sangat canggih sehingga tidak ada satupun negara yang menandinginya. Namun, kecanggihannya inilah yang menjadi panggung utama bagi penguasa untuk mengukuhkan otoritasnya secara mutlak. Adapun beberapa bentuk dominasinya, seperti fakta pembatasan hak bicara di ruang publik NKAL, yang diganti dengan peringatan 'Hari Bebas Berbicara' setahun sekali. Selain itu, adanya pengawasan CCTV yang ketat di seluruh sudut area, serta akses penuh terhadap internet dan *gadget* warga negaranya. Melalui tindakan tersebut, penguasa berupaya *rebranding* kebijakannya seakan-akan demi kesejahteraan bersama.

Namun, realitanya tindakan tersebut untuk membatasi kemungkinan pemberontakan yang dapat mengancam kekuasaannya. Adanya kompleksitas otoritarianisme dalam memanipulasi ruang publik tersebut telah memicu berbagai kajian ilmiah terdahulu. Peneliti memetakan kajian terdahulu yang berfokus pada novel *Bungkam Suara* karya J.S. Khairen dari berbagai perspektif dan eksplorasi kajian Habermas dalam novel lainnya. Selanjutnya peneliti mengklasifikasikan pemetaan tersebut ke dalam lima ranah utama, yaitu kritik sosial, hegemoni, komunikasi, psikologi tokoh, dan narasi.

Pada ranah kritik sosial, kajian Yulina (2023) dengan perspektif sosiologi, Rifqi (2023) dengan kacamata kriminologi, dan Defi (2024) dengan kajian stilistikanya yang berhasil membongkar berbagai bentuk pelanggaran sosial yang dikritik dalam novel itu. Dalam ranah yang sama, Puspitasari (2022) berhasil mengungkapkan kritik sosial dalam berbagai sektor melalui perspektif rasionalitas Habermas, meskipun diaplikasikan pada novel yang berbeda. Selanjutnya pada ranah hegemoni, kajian mendalam dilakukan oleh Yanti (2023), Prasetyo (2025), dan Prasetyo (2025) menggunakan perspektif Gramsci untuk mengungkapkan bentuk-bentuk ideologi, konflik kuasa, serta tingkatannya. Sementara itu, pada ranah komunikasi yang dilakukan oleh Awa (2024), Lolo (2025), dan Jemadin (2026) berhasil mengungkapkan adanya relasi literasi digital dengan kepentingan politik dalam novel itu. Di sisi lain, pada ranah psikologi, Az Zahra (2024) dengan perspektif Freud membedah *id*, *ego*, *superego* tokoh utamanya yang memicu

rasionalisasi dan intelektualitas sebagai bentuk *self defense mechanism*. Terakhir, pada ranah narasi, Huzaima (2024) dengan formula Cawelti mengungkapkan bahwa daya tarik novel itu dipengaruhi oleh melodrama dan eskapisme.

Berdasarkan pemetaan penelitian terdahulu tersebut, ditemukan kelemahan riset yang masih berfokus pada relasi kuasa secara umum dan belum membedah mekanisme komunikasi yang digunakan sebagai alat kuasa untuk mengontrol kesadaran publik secara spesifik. Merujuk pada konsep celah riset (*research gap*) dari Miles (2017), penelitian ini mengisi dua jenis gap sekaligus, yaitu celah teoritis (*theoretical gap*) dan celah populasi (*population gap*). Secara teoritis, kajian demokrasi deliberatif Habermas dominan digunakan dalam memahami fenomena di dunia nyata khususnya pada fenomena represi sosial, bukan pada teks sastra. Sementara itu, pada objek novel *Bungkam Suara*, meskipun telah dikaji melalui berbagai perspektif.

Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan kebaruan (*novelty*) dengan menghadirkan perspektif baru dari Habermas untuk membongkar fenomena distorsi komunikasi digital dalam teks sastra. Kajian Demokrasi Deliberatif Habermas digunakan sebagai pisau bedah utama novel *Bungkam Suara* karya J.S. Khairen. Secara teoritis, demokrasi deliberatif tidak memperoleh kekuatan legitimasinya melalui pembentukan opini sesuai kehendak penguasa, melainkan diskursus rasional (Habermas, 1996, hal. 296). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengungkap fakta pembatasan hak bicara warga negara NKAL di ruang publik, (2) mengidentifikasi bentuk distorsi komunikasi berupa propaganda penguasa beserta akibatnya, serta (3) membongkar penyimpangan tersebut melalui analisis pelanggaran klaim validitas Habermas yang meliputi: klaim kebenaran (*truth*), ketepatan (*rightness*), dan kejujuran (*sincerity*). Namun pada dasarnya, Habermas merumuskan empat klaim validitas termasuk komprehensibilitas (*comprehensibility*), tetapi dalam penelitian ini klaim tersebut tidak dijadikan tolak ukur karena fokus kajian pada distorsi komunikasi dan intervensi penguasa, bukan pada aspek semantik komunikasi para tokohnya. (Habermas, 1984, hal. 99). Sebagaimana ditegaskan oleh Habermas (1984,

hal. 332–333), bahwa komunikasi yang terdistorsi secara sistematis termasuk dalam tindakan strategis yang tersembunyi (*concealed strategic action*). Dalam kondisi tersebut, adanya manipulasi bahasa sedemikian rupa dimaksudkan agar tampak seperti usaha mencapai kesepahaman, padahal faktanya bahasa tersebut merupakan instrumen yang memiliki kepentingan tertentu. Lebih jauh lagi, penelitian ini ditujukan untuk mengeksplorasi kajian Habermas pada karya sastra, salah satunya novel sebagai media refleksi sosial yang kompleks.

METODE

Penelitian ini dirancang menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Denzin & Lincoln (dalam Ahmadi, 2019, hal. 3), bahwa penelitian kualitatif berfokus pada proses dan makna daripada pengukuran angka. Dalam konteks kajian sosiologi sastra, metode ini dipadukan dengan pendekatan mimetik Abrams (1953, hal. 8) yang berfungsi untuk mengaitkan fenomena represi kebebasan dalam dunia nyata dengan representasi fiksional dalam karya sastra. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini dapat menggunakan kajian Demokrasi Deliberatif Habermas untuk membedah teks.



Gambar 1. Cover Novel
Bungkam Suara Karya J.S. Khairen

Sasaran utama sekaligus objek material dalam penelitian ini adalah novel *Bungkam Suara* karya J.S. Khairen. Novel yang terdiri atas 366 halaman ini merupakan *best seller product* di Gramedia. Kepopuleran tersebut disebabkan oleh alur cerita yang sangat kompleks dan relevan. Novel tersebut dipilih karena berbeda dengan kebanyakan novel lainnya yang bercerita tentang kekerasan dalam kekuasaan, melainkan menghadirkan fenomena baru tentang pengaruh media digital dalam

sebuah dominasi kekuasaan. Fenomena tersebut sangat relevan dengan digitalisasi dalam dunia nyata saat ini, khususnya pada otoritas penguasa dalam mengawasi segala perilaku masyarakatnya. Melalui pembacaan yang komprehensif, populasi data primer yang diambil dalam bentuk frasa, kata, dan kalimat narasi maupun dialog tokoh yang merepresentasikan dominasi kekuasaan dan represi ruang publik. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur pendukung, seperti buku referensi teori Habermas, penelitian terdahulu serta informasi faktual terkait fenomena distorsi komunikasi di dunia nyata sebagai perbandingan dalam konsep mimetik.

Dalam penelitian ini, peneliti hadir sebagai instrumen utama yang secara aktif bertugas membaca, mencatat, dan menginterpretasikan makna dalam teks tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan berfokus pada teknik simak dan pencatatan. Adapun beberapa tahapan pengumpulan data primer, yaitu (1) pembacaan novel *Bungkam Suara* karya J.S. Khairen secara keseluruhan dalam dua siklus (heuristik dan hermeneutik), (2) penandaan data berbentuk, frasa, kata, kalimat, dan paragraf narasi maupun dialog dalam novel yang relevan dengan manipulasi ruang publik, (3) data yang dikumpulkan kemudian diklasifikasikan dan diberi nomor urut, yaitu Fakta Pembatasan Hak Bicara, Bentuk Distorsi Komunikasi, dan Pelanggaran Klaim Validitas, (4) selanjutnya dilakukan analisis data tersebut dengan menginterpretasikannya sesuai kajian Demokrasi Deliberatif Habermas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini memaparkan temuan penelitian berupa represi wacana dan manipulasi ruang publik dalam novel *Bungkam Suara* karya J.S. Khairen. Melalui pendekatan mimetik Abrams untuk memotret keterkaitan antara teks fiksi dan realitas sosial, serta didukung oleh pisau analisis Demokrasi Deliberatif Habermas, maka pembahasan dikonstruksi ke dalam tiga tahapan. Pertama, membenturkan opini dengan fakta pembatasan hak bicara berdasarkan kondisi sosial. Selanjutnya yang kedua, menguraikan bentuk distorsi komunikasi yang dihubungkan dengan akibatnya terhadap masyarakat. Terakhir yang ketiga, menggabungkan keseluruhan data tersebut untuk membuktikan terjadinya distorsi

komunikasi melalui pelanggaran klaim validitas Habermas.

1. Fakta Pembatasan Hak Bicara

Faktanya, dalam praktik pembatasan hak bicara sering kali tidak dilakukan secara terang-terangan, melainkan dibungkus dengan alasan ‘demi kepentingan dan kesejahteraan bersama’. Habermas (1996, hal. 360) juga menyatakan bahwa demokrasi yang sehat itu tercipta dari kebebasan dalam ruang publik, di mana setiap individu berhak menyampaikan pendapatnya tanpa intervensi dari pihak mana pun. Melalui pendekatan mimetik, novel *Bungkam Suara* justru mencerminkan kondisi sebaliknya, Negara Kesatuan Adat Lemunesia (NKAL) sebagai latar cerita dengan jelas mematikan kebebasan tiap individu melalui aturan dan pengawasan yang ketat, serta dibungkus dengan narasi ‘kepentingan bersama’. Meninjau kondisi masyarakatnya, nyatanya klaim perlindungan hanyalah alat untuk menebar ketakutan dan membungkam kritik. Hal tersebut disajikan oleh peneliti dalam bentuk benturan antara opini dan fakta dalam teks, seperti pada tabel 1 berikut.

Tabel 1
Fakta Pembatasan Hak Bicara

No.	Fakta Pembatasan Hak Bicara	
	Opini	Fakta
1.1	Ini adalah hari bebas berbicara di Negara Kesatuan Adat Lawaknesia (NKAL). Siapa saja bebas bicara terang-terangan tanpa takut terjatuh hukum... Tujuannya, agar tercapai keadilan untuk seluruh rakyat (Khairan, 2023, hal. vii)	Jutaan aib terbongkar. Jutaan fitnah dipanen. Jutaan kebencian dan perundungan berserakan. Rakyat berkelahi dengan rakyat... (Khairan, 2023, hal. vii)
1.2	... Di NKAL, tidak boleh ada serangan fisik pada siapa pun. Kepolisian Kerajaan akan menangkap jika berani melakukan kontak fisik. CCTV di stasiun pun merekam rangkaian kejadian itu (Khairan, 2023, hal. 19)	... Orang-orang takut karena gerak gerik mereka terekam CCTV. Langsung terpantau di Istana (Khairan, 2023, hal. 1)
1.3	“... Undang-undang pasti bekerja, Kepolisian Kerajaan pasti turun tangan. Bahkan di kasus-kasus tertentu... Kerajaan pun akan turun.” (Khairan, 2023, hal. 16)	Timmy melotot mendengar itu, langsung menutup mulut adiknya. “Hei! Jangan berkata kasar! Kamu bisa ditangkap. Ini belum Hari

No.	Fakta Pembatasan Hak Bicara	
	Opini	Fakta
		Bebas Bicara!” (Khairan, 2023, hal. 11)

2. Bentuk Distorsi Komunikasi

Setelah strategi para pihak berkepentingan berhasil menguasai ruang publik dengan segala cara dalam membatasi hak setiap individu, langkah selanjutnya yaitu melegitimasi posisinya dengan memanipulasi pikiran masyarakat melalui informasi dengan bahasa. Kondisi ini sejalan dengan perspektif Habermas (1984, hal. 285) mengenai distorsi komunikasi, ketika para penguasa memiliki akses penuh dalam menggunakan narasi untuk mempengaruhi perspektif masyarakat dengan *buzzer* yang memenuhi *timeline* media digital. Mulai dari isu-isu remeh yang memecah fokus masyarakat, serta mendramatisasi setiap peristiwa kriminal layaknya hiburan di akhir pekan. Taktik intervensi dalam informasi ini berdampak buruk karena dapat menurunkan kapasitas nalar setiap individu, memicu perpecahan, mengalihkan perhatian atas ketidakadilan sehingga sebagai pencitraan. Berbagai bentuk distorsi komunikasi disajikan oleh peneliti dengan mengaitkannya akibat langsung terhadap kondisi sosial masyarakat yang dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2
Bentuk Distorsi Komunikasi

No.	Bentuk Distorsi Komunikasi	
	Bentuk	Dampak
2.1	Sepertiga warga NKAL itu kehilangan uang mereka secara mendadak dan misterius... Dan hukum menetapkan Ayah Timmy pelakunya... “Jika Pemangku Adat dan Kepolisian Kerajaan tak bisa menjalankan tugas mereka, mencari siapa kriminalnya, maka biarkan saya turunkan para Tentara Kerajaan.” Titah Raja Wiranagara waktu itu (Khairan, 2023, hal. 17–18)	... Inilah penyebab kenapa keluarga Timmy begitu dibenci (Khairan, 2023, hal. 18)
2.2	Berderet-deret judul berita yang siap dilempar. Mulai dari berita besar, biasa aja, sampai yang remeh-temeh... Meski kasusnya remeh-	Banyak obrolan di media sosial NKAL adalah hal-hal yang tak penting. Namun itulah keseharian

No.	Bentuk Distorsi Komunikasi	
	Bentuk	Dampak
	temeh, beberapa di antaranya akan membuat negara heboh (Khairin, 2023, hal. 110)	warganya, mengisi kepala dan batin dengan hal-hal tak penting adalah pelepas dahaga bagi mereka.... (Khairin, 2023, hal. 41)
2.3	"Wartawan lain membangun narasi berbeda. 'Kurang lebih tiga puluh personel Kepolisian Kerajaan mengawal Karen Sang Selebritis....' (Khairin, 2023, hal. 15)	"...sebagian lainnya ikut-ikutan, dan sebagian lain karena pelampiasan terhadap hidup mereka yang payah. Kasus-kasus seperti itu, bak hadiah dan perayaan." (Khairin, 2023, hal. 16)
2.4	"Itu adalah akun anonim... Beda cerita jika ia mengungkapkan di Hari Bebas Bicara. Di hari itu, siapa yang anonim malah akan dikejar oleh Kepolisian Kerajaan..." (Khairin, 2023, hal. 18)	"Jutaan tangan dan kaki yang sibuk mencari makan adalah jutaan kepala yang takkan sempat berpikir dan jutaan mulut yang tak bisa bicara." (Khairin, 2023, hal. 17)

3. Pelanggaran Klaim Validitas

Berdasarkan fakta pembatasan hak bicara dalam ruang publik dan penyimpangan informasi yang disajikan pada tabel sebelumnya, terbukti sistem yang brutal tersebut telah dikonstruksi secara sistematis dibalikny. Padahal, Habermas (1984, hal. 99) telah merumuskan, bahwasannya sebuah interaksi yang sehat dan rasional dapat diuji melalui tiga syarat mutlak yang disebut klaim validitas (keabsahan), yang meliputi kebenaran, ketepatan, dan kejujuran. Melalui refleksitas fenomena dalam novel *Bungkam Suara*, terlihat bahwa para pihak berkepentingan terbukti melanggar syarat interaksi yang ideal demi melanggar otoritasnya.

Pelanggaran Klaim Kebenaran (*Truth Claims*)

Merujuk pada pernyataan Habermas (1984, hal. 99) mengenai klaim ini, bahwasanya setiap pernyataan yang disampaikan harus sesuai dengan fakta yang objektif. Namun, para pihak yang berkepentingan melanggar syarat ini

dengan memproduksi dan menyebarkan wacana fiktif demi menutupi kejahatan dan kepentingan mereka. Mengacu pada data 2.2, dapat dimaknai bahwa para penguasa menganggap obrolan yang tidak penting di media sebagai hiburan untuk para warganya setelah bekerja seharian. Padahal, nyatanya topik tersebut berasal dari berita rekayasa yang siap dilempar ke publik untuk menghilangkan kesadaran warganya. Selain itu, alih-alih mengusut tuntas kasus kriminal yang diderita oleh keluarga Timmy sebagai 'kambing hitam', justru mereka mendramatisasi dengan narasi-narasi yang beredar untuk menyesatkan masyarakat hingga menimbulkan kebencian kolektif. Fenomena ini mempertegas pandangan Habermas (1984, hal. 285) bahwa ketika kebenaran informasi dimanipulasi demi mempertahankan dominasi, maka komunikasi publik akan terjebak dalam distorsi sistematis yang memutus kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap realitas yang sebenarnya. Jadi, pada kedua data tersebut telah melanggar klaim kebenaran sebagaimana pemaparan Habermas sebelumnya.

Pelanggaran Klaim Ketepatan (*Rightness Claims*)

Pada syarat berikutnya yaitu klaim ketepatan norma berfungsi untuk menilai apakah sebuah aturan hukum atau tindakan penguasa selaras dengan norma yang bersifat objektif atau adil. Habermas (1996, hal. 107) menegaskan, bahwa sebuah hukum dapat diakui dan berlaku ketika mendapat persetujuan dari seluruh pihak secara terbuka tanpa intervensi pihak lainnya. Di NKAL berbeda, penguasa membuat perspektif seakan-akan kehadiran kepolisin, tentara, dan CCTV bertujuan untuk melindungi warganya dari tindak kekerasan sesuai pada data 1.2 dan 1.3. Namun faktanya dapat diinterpretasikan, bahwa alat-alat keamanan negara tersebut difungsikan untuk mengontrol secara ketat gerak-gerik warga pada setiap sudut. Tekanan ini memaksa warga seperti Timmy untuk membungkam kebenaran atas fitnah yang diterima keluarganya, atau jika tidak, hanya akan memperburuk hidupnya. Aturan ini jelas melanggar klaim ketepatan norma karena fungsi hukum lebih condong ke bawah untuk mempertahankan citra penguasanya.

Pelanggaran Klaim Kejujuran (*Sincerity Claims*)

Klaim yang terakhir ini berfokus menilai suatu niat penuturnya sejalan atau tidak dengan fakta yang ada dan disampaikan apa adanya secara terbuka kepada publik. Dalam hal ini, Habermas (1984, hal. 99) menegaskan bahwa klaim kejujuran menuntut adanya transparansi motif subjektif sehingga penuturnya tidak boleh menyembunyikan kepentingan tertentu di balik retorika komunikasinya. Namun, tidak bagi para penguasa NKAL karena melakukan pelanggaran kebohongan terbesar kepada warganya dengan memperingati 'Hari Bebas Berbicara' setahun sekali. Sesuai pada data 1.1 dapat dipahami, ketika di hadapan warganya, penguasa berjanji bahwa dengan adanya hari tersebut agar tercapainya keadilan kepada seluruh lapisan masyarakat. Namun, niat asli penguasa hanyalah untuk mendapat atensi masyarakat agar dipandang memfasilitasi hak bicara mereka. Faktanya, selain tujuan tersebut, para penguasa memang menciptakan ruang publik yang *chaos* dengan penuhnya ujaran hinaan, kebencian, dan fitnah satu sama lain. Lebih jauh lagi, ketika meninjau data 2.4 dapat ditafsirkan, hari kebebasan tersebut hanyalah jebakan sistematis untuk melacak dan menangkap orang-orang anonim yang berani mengkritik kerajaan. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa sama sekali tidak ada transparansi atau kejujuran dari penguasa, semua janji kebebasan hanyalah tindakan strategis tersembunyi (*concealed strategic action*) untuk membuat rakyat bawah makin sibuk, tidak sempat berpikir, dan akhirnya bungkam selamanya. Kondisi ini sejalan dengan tesis Habermas (1984, hal. 332) mengenai tindakan strategis tersembunyi bahwa penguasa secara sadar memanipulasi dengan berpura-pura menawarkan ruang kebebasan, padahal motif aslinya adalah demi efektivitas kontrol sosial dan melacak aktivis. Melalui taktik manipulatif tersebut, janji kebebasan justru dimanfaatkan untuk menguras energi masyarakat kelas bawah, membuat mereka makin sibuk dengan dinamika wacana fiktif yang kompleks, tidak sempat berpikir jernih dan rasional, yang pada akhirnya membungkam sebuah kritik perubahan secara tidak sadar selama-lamanya.

PENUTUP Simpulan

Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan di atas, penelitian ini berhasil membongkar bagaimana praktik kekuasaan dalam novel *Bungkam Suara* karya J.S. Khairen mampu mendistorsi komunikasi secara sistematis di ruang publik. Mengenai fakta pembatasan hak bicara, peneliti menemukan bahwa indikasi tersebut tidak diwujudkan dengan kekerasan secara vulgar, melainkan dengan intervensi dalam pengawasan digital, seperti CCTV dan internet. Selain itu, adanya peringatan 'Hari Bebas Berbicara' yang sengaja didesain sebagai jebakan sistematis untuk melacak para aktivis. Dengan demikian, ruang publik yang semestinya bersifat inklusif telah dikuasai penuh oleh penguasa, sehingga kebebasan berpendapat warga menjadi lumpuh akibat teror psikologis yang diterapkan secara masif.

Pada masalah kedua, berbagai bentuk distorsi komunikasi diidentifikasi hadir secara masif melalui operasi propaganda dan rekayasa informasi di ruang digital. Pihak otoritas secara sadar memproduksi berita fiktif, melempar isu-isu remeh sebagai hiburan pengalih perhatian, serta mendramatisasi kasus kriminal untuk memicu kegaduhan massal di kalangan warga negara. Taktik *rebranding* diterapkan oleh penguasa guna menutupi realitas objektif sekaligus menumpulkan kesadaran kritis masyarakat kelas bawah. Melalui strategi pembanjiran informasi (*information flooding*) tersebut, fungsi tindakan komunikatif sepenuhnya digantikan secara strategis demi mengontrol cara pandang publik agar senantiasa selaras dengan agenda penguasa.

Kemudian, seluruh kekacauan komunikasi di ruang publik tersebut bermuara pada terjadinya pelanggaran mutlak terhadap tiga klaim validitas Habermas, yakni klaim kebenaran (*truth claim*), ketepatan (*rightness claim*), dan kejujuran (*sincerity claim*). Penguasa terbukti memproduksi wacana palsu, menyalahgunakan norma hukum demi melegitimasi penindasan, serta menjalankan tindakan strategis terselubung (*concealed strategic action*) guna menyembunyikan motif asli di balik janji manis kebebasan. Kebaruan (*novelty*) ilmiah dari penelitian ini berhasil memperlihatkan corak baru distopia lokal dalam sastra kontemporer Indonesia, di mana pembungkaman suara warga

tidak lagi mengandalkan kekerasan fisik, melainkan beralih pada manipulasi kesadaran berbasis kuasa digital.

Dengan demikian, secara kontekstual temuan distorsi komunikasi dalam novel *Bungkam Suara* ini, sangat relevan dengan kondisi demokrasi digital di Indonesia sekarang karena penggunaan buzzer, algoritma media sosial, dan manipulasi sentimen publik seringkali mengaburkan substansi kritik dan menghancurkan ruang diskursus yang rasional. Selain itu secara teoretis, signifikansi penelitian ini membuktikan bahwa novel tersebut merepresentasikan matinya rasionalitas dalam komunikasi akibat fenomena kolonisasi *lifeworld*. Implikasi praktisnya, karya sastra terbukti mampu menjadi medium kritik yang tajam terhadap intervensi penguasa dalam media digital. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengaplikasikan teori Habermas pada karya sastra kontemporer lain, yang merepresentasikan fenomena era *post-truth* atau rekayasa opini massa sebagai perbandingan yang lebih komprehensif mengenai pola distorsi ruang publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrams, M. H. (1953). *The mirror and the lamp: romantic theory and the critical tradition*. Oxford University Press.
- Ahmadi, A. (2019). *Metode penelitian sastra*. Graniti.
- Awa, C. R. B., & Widjayanto, F. R. (2024). Karya sastra sebagai sarana literasi politik: novel "Bungkam Suara" karya J. S. Khairen sebagai narasi melawan propaganda terkomputasi. *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, 10(2), 156–183. <https://doi.org/10.20473/jpi.v10i2.65355>
- Az Zahra, K. R., Raharjo, R. P., & Ahmadi, A. (2024). Aktualisasi dan self defense mechanism tokoh utama novel "Bungkam Suara": kajian perspektif psikoanalisis Sigmund Freud. *Diksatrasia : Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 8(1), 119. <https://doi.org/10.25157/diksatrasia.v8i1.12206>
- Castells, M. (2009). *Communication Power*. Oxford University Press.
- Damono, S. D. (1978). *Sosiologi sastra: sebuah pengantar ringkas*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Defi, D. A. (2024). *Kritik sosial dalam novel Bungkam Suara karya J.S. Khairen dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA: Kajian Stilistika* [Universitas Lampung]. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/84478>
- Faruk. (2017). *Pengantar sosiologi sastra: dari strukturalisme genetik sampai post-modernisme*. Pustaka Pelajar.
- Habermas, J. (1984). The theory of communication action vol. 1: reason and the rationalization of society. In T. McCarthy (Ed.), *Beacon Press*. Beacon Press.
- Habermas, J. (1996). Between facts and norms. In W. Rehg (Ed.), *The MIT Press*. The MIT Press.
- Huzaima, F. N. (2024). Novel Bungkam Suara Karya J.S. Khairen: kajian formula cawelti. In *Universitas Andalas*. Universitas Andalas.
- Jemadin, S., & Tahamin, A. (2026). Demokrasi deliberatif Habermas dan problematika ideologi di ruang publik digital. *Jurnal Ilmu Kateketik Pastoral Teologi, Pendidikan, Antropologi, dan Budaya*, 9(1), 15–27. <https://ejournalstpbonaventura.ac.id/index.php/JURKAPS/article/view/183/107>
- Khairan, J. S. (2023). *Bungkam suara*. Grasindo.
- Lolo, J. S. (2025). *Manajemen konflik: analisis konsep manajemen konflik dalam Novel Bungkam Suara* [Institut Agama Kristen Negeri Toraja]. <https://digilib-iaikntoraja.ac.id/4581/>
- Marsh, N., & Singgih, V. (2024). *Police clash with protesters over Indonesia law change*. BBC. <https://www.bbc.com/news/articles/c8er13zy1gxo>
- Miles, D. A. (2017). A taxonomy of research gaps: Identifying and defining the seven research gaps. *Journal of Research Methods and Strategies*, (August), 1–15. https://www.researchgate.net/publication/319244623_ARTICLE_Research_Methods_and_Strategies_Workshop_A_Taxonomy_of_Research_Gaps_Identifying_and_Defining_the_Seven_Research_Gaps
- Muhid, H. K., Hasan, A. Al, & Fajri, D. A. (2024). *Soal Jokowi ajak sejumlah influencer ke IKN, pengamat politik: cara instan poles citra positif*. Tempo.co. <https://www.tempo.co/politik/soal-jokowi-ajak-sejumlah-influencer-ke-ikn-pengamat>

- politik-cara-instan-poles-citra-positif-34414
- Prasetyo, J. S. (2025). *Praktik demokrasi di Indonesia pada novel Bungkam Suara Karya J.S. Khairen: kajian hegemoni gramsci* [Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan]. <https://repository.unisda.ac.id/3868/>
- Prasetyo, W. T., Sariban, S., & Sutardi, S. (2025). Praktik Kekuasaan di Indonesia pada Novel Bungkam Suara Karya J.S. Khairen: Kajian Hegemoni Gramsci. *HASTAPENA : JURNAL BAHASA, SASTRA, PENDIDIKAN DAN HUMANIORA*, 2(2), 87–92. <https://ejurnal.unisda.ac.id/index.php/HASTAPENA/article/view/10939>
- Puspitasari, I., & Parmin. (2022). Kritik sosial dalam novel Men Cobleng Karya Oka Rusmini (kajian sosial kritis Jurgen Habermas). *Sapala*, 9(2), 44–45. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-sapala/article/view/47672>
- Rifqi, M. I. N. F., & Ahmadi, A. (2023). Korupsi dalam novel Bungkam Suara Karya JS Khairen dan Tanah Para Bandit Karya Tere Liye: Kajian Krimonologi. *Bapala*, 10(4), 280. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/bapala/article/view/55840>
- Wellek, R., & Warren, A. (1949). *Theory of literature*. Harcourt, Brace and Company.
- Yanti, N. (2023). Hegemoni ideologi dalam novel Bungkam Suara Karya J.S. Khairen kajian hegemoni Gramsci. In *Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan*. <https://repository.unisda.ac.id/1853/>
- Yulina. (2023). Kritik sosial dalam Novel Bungkam Suara Karya J.S. Khairen dan implikasinya terhadap pembelajaran hikayat dan cerpen kelas X SMA (Kajian Sosiologi Sastra). In *Universitas Islam Sultan Agung*. <https://repository.unissula.ac.id/33303/>